



LAPORAN TAHUNAN YAPPIKA
2008/2009

MENINGKATKAN
POSISI TAWAR
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL



Laporan Tahunan ini diproduksi atas dukungan dari :



MENINGKATKAN POSISI TAWAR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

LAPORAN TAHUNAN YAPPIKA 2008/2009



Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi

Jl. Pedati Raya No. 20 Rt. 007/09 Jakarta Timur 13350 - INDONESIA
Phone : 62 (21) 819 1623 Fax : 62 (21) 850 0670 - 8590 5262
e-mail: yappika@indosat.net.id
www.yappika.or.id

daftar isi

KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR EKSEKUTIF YAPPIKA	
● Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	1
KATA PENGANTAR DARI KETUA PEMBINA YAPPIKA	
	3
KATA PENGANTAR DARI PENGAWAS YAPPIKA	
	5
MENINGKATKAN POSISI TAWAR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	
● Suara Yang Diperhitungkan	
• Membangun Kelembagaan yang Sehat dan SDM Berkapasitas	7
• Ketekunan Menggulirkan Kesadaran Arus Bawah	9
• Dari Warung Kopi ke Kantor Bupati	10
• Mendulang Kepercayaan untuk Mendorong Kebijakan	11
• Dari Lembaga Religius ke Ranah Advokasi	13
• Alue Limeng, Menggerakkan Kerelawanan Mendorong Kebijakan	14
● Benih-benih Aktivisme Kaum Muda	
• Menyemai Benih Aktivisme melalui Pers Kampus	16
• Keteguhan di Bawah Terik Matahari	17
● Membangun Kelembagaan OMS	
• Strategi Peningkatan Kapasitas yang Unik di Program ANCORS	19
• Kelembagaan yang Sehat untuk Melanjutkan Misi Keadilan Gender	20
● Ujung Nasib RUU Pelayanan Publik Di Tahun 2008	
• Ketok Palu yang Tak Kunjung Tiba	21
● Belajar, Bergerak Dan Bersenyawa	
• Oleh: Sutoro Eko	23
PRODUK KEBIJAKAN YANG BERHASIL DIDORONG OLEH MITRA PROGRAM ANCORS	
● Usulan Kebijakan oleh Mitra Program ANCORS:	26
● Usulan Kebijakan yang telah Disahkan:	27
SINERGI KERJA YAPPIKA DALAM KEMITRAAN	
● Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh	28
● Advokasi RUU Pelayanan Publik	29
● Pemanfaatan IMS dalam Program ACCESS Tahap I	29
● Program Deteksi Dini Kanker PayudaraI	29
● Pelibatan Relawan	29
MAJALAH DAN BUKU TERBITAN YAPPIKA PERIODE APRIL 2008 - MARET 2009	
● Majalah	30
● Buku	30
● Film Dokumenter	31
LAPORAN KEUANGAN	
● Statement Auditor, Hasil Audit & Laporan Keuangan	32

KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR EKSEKUTIF YAPPIKA



Lili Hasanuddin
Direktur Eksekutif YAPPIKA

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Dalam beberapa kejadian, peran OMS masih dipandang sebelah mata oleh pengambil keputusan, lebih-lebih bagi OMS yang bekerja di tingkat lokal. Selain karena kondisi tata kelola lembaga yang tidak jelas dan legitimasi konstituen yang masih dipertanyakan, alasan yang seringkali mencuat ke permukaan adalah OMS tidak memiliki kapasitas yang memadai. Diakui bahwa OMS sangat vokal menyuarakan kepeduliannya, tetapi seringkali hanya memuat jargon-jargon. Manakala pembahasan menukik ke aras yang lebih detil, tidak terlihat kemampuan teknokratis OMS untuk dapat disumbangkan bagi kemajuan daerah. Pun, seringkali OMS dinilai tidak memiliki data yang akurat mengenai hal-hal yang layak diangkat sebagai bahan pembuat kebijakan. Data yang dimiliki OMS terbatas pada skala kecil dengan validitas yang seringkali masih diragukan. Akibatnya, data-data tersebut sulit untuk diangkat sebagai bahan pembuatan kebijakan yang bersifat menyeluruh.

Berbasis pada kejadian-kejadian seperti itulah program ANCORS di Aceh kami kembangkan. Melalui program ini kami berusaha membangun kapasitas OMS untuk dapat berdialog dan diperhitungkan keberadaannya oleh para pengambil keputusan di tingkat lokal. Tantangannya tentu saja tidak kecil, lebih-lebih bila melihat situasi Aceh yang baru saja diterjang tsunami yang tidak hanya menghancurkan kondisi fisik wilayah Aceh tetapi juga menghilangkan banyak aktivis OMS berpengalaman.

Kegiatan kami awali dengan identifikasi OMS yang ada di sebuah kabupaten tertentu, dan kemudian bersama-sama mempelajari persoalan di wilayah berangkutan sambil sekaligus membangun kesepahaman dan orientasi bersama atas tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu, perhatian kami arahkan untuk membangun tata-kelola lembaga yang baik lalu bergerak ke arah peningkatan kapasitas agar OMS dapat menjadi "lawan tanding" yang seimbang dengan pemerintahan lokal.

Kegiatan peningkatan kapasitas kami lakukan melalui serangkaian aktivitas yang terintegrasi dan sistematis. Untuk kapasitas pengumpulan informasi dan data, misalnya, kami selenggarakan training riset aksi melalui pemberian materi *in-class*, penggalian data lapangan, *peer learning* antar peneliti, dan *coaching* secara terus menerus sehingga lahir hasil riset yang memuat data lapangan yang valid untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dalam hal pengorganisasian komunitas, pendampingan intensif kepada masyarakat menjadi aktivitas utama bagi seluruh OMS yang terlibat dalam program ini. Dengan demikian, pengorganisasian yang berlangsung tidak hanya terjadi melalui pertemuan reguler, tetapi para *community organizer* menjadi teman diskusi yang intens bagi masyarakat dalam membahas persoalan mereka.

Dalam hal advokasi kebijakan, seluruh pendekatan digunakan untuk mengintensifkan daya terima pengambil keputusan terhadap apa yang diperjuangkan oleh masyarakat bersama OMS yang mendampinginya. Baik kalangan eksekutif maupun legislatif mereka datangi. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk membangun kemitraan strategis antara masyarakat dan OMS dengan pengambil keputusan. Meskipun demikian, kemitraan strategis yang terbangun tidak sampai menghilangkan daya kritis masyarakat dan OMS setempat dalam mendesak gagasan-gagasannya. Jika melalui lobby tidak berhasil, kampanye publik diintensifkan bahkan tidak jarang pula aksi-aksi massa dilakukan.

Kami bersyukur kapasitas OMS di wilayah-wilayah kerja program menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagai hasilnya, posisi tawar OMS pun meningkat. Beberapa usulan yang disampaikan diterima oleh pengambil keputusan. Bahkan, tidak sedikit OMS yang kemudian diminta bantuan oleh pengambil keputusan untuk mendampingi mereka menyusun rancangan kebijakan yang menjadi kebutuhan di daerah setempat.

Narasi-narasi itulah yang kami tuangkan dalam laporan tahunan YAPPIKA kali ini. Tentu saja seluruh narasi tersebut bukanlah milik YAPPIKA semata, tetapi merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas yang dilakukan bersama-sama dengan mitra YAPPIKA, baik di Aceh maupun di tingkat nasional.

Semoga laporan tahunan ini bermanfaat bagi kita semua.

Salam,
Lili Hasanuddin
Direktur Eksekutif

KATA PENGANTAR DARI KETUA PEMBINA YAPPIKA



Dwi Astuti
Ketua Pembina YAPPIKA

Tatkala gelombang reformasi bergulir pada pertengahan tahun 1998, harapan akan tumbuhnya demokrasi di Indonesia menyeruak. Cahaya terang demokrasi terlihat sedang beranjak dari peraduan di negeri yang telah sekian lama terkungkung dalam rezim otoritarian. Berbagai fenomena muncul seperti berkurangnya peran militer dalam kancah sosial politik, mekanisme multi partai, terbukanya ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat, munculnya berbagai media massa dengan ulasan kritis tentang kebijakan pemerintah dsb. Namun ketika reformasi memasuki usianya yang ke 11, harapan itu tak kian benderang; banyak kalangan bersikap skeptis bahkan pesimis dan menilai bahwa reformasi belum menyentuh pada transisi demokrasi menuju esensi perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, transisi demokrasi yang terjadi cenderung mengarah pada demokrasi liberal (pasar) yang lebih mengutamakan mekanisme dan prosedur, sementara masyarakat makin terpinggirkan dalam model demokrasi seperti ini.

YAPPIKA yang memiliki visi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya serta mandat yang jelas antara lain untuk melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandirian dan mempengaruhi kebijakan publik di berbagai tingkatan serta mendorong terbangunnya sinergi antar organisasi masyarakat sipil, maka pada periode 2008/2009 ini YAPPIKA telah melakukan berbagai upaya dalam kerangka memperkuat posisi tawar organisasi masyarakat sipil di Aceh melalui program penguatan masyarakat sipil Aceh (ANCORS). Program ini berfokus pada 3 (tiga) pilar; penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan pengembangan jaringan serta kampanye publik. Selain itu, YAPPIKA bersama mitranya juga telah melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pada aras daerah dan nasional agar

lebih berpihak kepada rakyat. Kegiatan dan capaian YAPPIKA pada periode 2008/2009 dapat kita lihat pada laporan tahunan berikut ini.

Laporan tahunan ini mencakup berbagai proses penting dalam membangun demokrasi di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya melalui peningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat. Dari semua kerja keras yang telah dilakukan pada periode 2008/2009 kita bisa melihat antara lain bahwa masyarakat sipil di Aceh telah mampu menunjukkan eksistensinya dengan menyusun 39 usulan kebijakan terkait kebijakan publik serta melakukan advokasi anggaran pendidikan. Tentu ini merupakan capaian yang sangat berharga mengingat sejarah panjang pemandulan gerakan masyarakat sipil di Aceh melalui Daerah Operasi Militer (DOM) dan upaya represif lainnya. Capain lainnya adalah penguatan organisasi perempuan yang telah meredefinisikan peran dan tanggungjawabnya agar mampu mewarnai proses demokrasi di Aceh dengan mengedepankan keadilan jender. Keadilan jender adalah isu yang esensial dalam demokrasi sebagai bagian dari transformasi budaya dan mendukung berkembangnya lembaga-lembaga yang demokratis. Selain itu, melalui program ANCORS juga telah mampu menumbuhkan semangat vokasionalisme dalam bentuk kaderisasi aktivis gerakan serta mengasah kepedulian sosial generasi muda melalui jaringan relawan.

Meskipun kemajuan penting dalam penguatan masyarakat sipil telah dicapai namun perjalanan masih panjang bagi YAPPIKA dalam mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis. Oleh karena itu, pelajaran yang YAPPIKA peroleh pada periode ini adalah bekal yang berarti dalam meneruskan perjalanan mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih kepada mitra YAPPIKA yang telah memberikan dukungan sehingga capaian-capaian ini bisa diraih. Juga kepada seluruh mitra yang telah berpartisipasi dan belajar bersama dalam program ini. Marilah terus kita rekatkan solidaritas agar mampu menghadapi tantangan yang makin berat.

Salam,
Dwi Astuti
Ketua Pembina

KATA PENGANTAR DARI PENGAWAS YAPPIKA



Th. Trisna Ansarli
Ketua Pengawas YAPPIKA

Sejak laporan pertanggung jawabannya pada akhir 2007, Pengurus yang sekaligus merupakan pimpinan pelaksanaan harian /eksekutif yang dipercayakan untuk mengelola program YAPPIKA, telah berupaya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi agar visi yang telah digariskan dapat diwujudkan melalui misi yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Strategis (Renstra) secara bersama dan hasilnya dapat kita simak bersama pada Laporan Tahunan periode tahun 2008-2009 ini.

Sebagai Pengawas, setelah mempelajari kerangka dan substansi kegiatan yang terpapar pada laporan ini, tampak bahwa capaian ini sebagai realisasi dari tujuan pemberdayaan kemampuan masyarakat sipil yang menjadi sasaran program YAPPIKA yang telah dilaksanakan dengan baik. Capaian-capaian ini berkat kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki aspirasi perjuangan yang sama, baik itu dari aspek sasaran kegiatan maupun pendanaan. Pengurus telah berupaya mengembangkan jejaring secara efektif dan efisien. YAPPIKA juga telah mengembangkan pelayanan konsultasi dan fasilitasi pelatihan bagi kelompok masyarakat sipil yang membutuhkannya.

Sejauh pengamatan dan observasi yang sempat dilakukan, Pengurus telah menjalankan fungsinya berdasarkan tata-kelola yang baik (*good governance*) pada manajemen sekretariat dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terutama dalam memimpin dan membina kerjasama sumber daya manusia yang di tataran manajemen, sebagai upaya membangun *team work*, sehingga dapat mendukung capaian kerja yang optimal, efektif dan efisien.

Dari aspek pendanaan sampai akhir tahun 2008, didukung oleh sumber-sumber dana berasal dari *Canadian International Development Agency (CIDA)* melalui *USC Canada*, *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)*, *United Nation Development Program (UNDP)*, Yayasan TIFA, Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) dan fundraising dari jasa konsultasi staf. Dana-dana tersebut dapat dimobilisir melalui tata kelola keuangan yang proporsional sehingga kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dapat dijalankan secara efisien.

Kendatipun frekuensi pelaksanaan pengawasan oleh Pengawas, khususnya menyangkut supervisi dan audit keuangan tidak dilakukan cukup intens, namun tidak mempengaruhi performance kerja pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan keuangan YAPPIKA juga didukung audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang dilakukan pada bulan akhir Maret – Mei 2009.

Akhirnya tentu tidaklah berlebihan bilamana kami sebagai anggota Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus dan eksekutif YAPPIKA, menyampaikan rasa terima kasih dan selamat atas segala capaian selama periode tahun 2008-2009 ini.

Th. Trisna Ansarli
Ketua Pengawas

MENINGKATKAN POSISI TAWAR ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Suara Yang Diperhitungkan

Membangun Kelembagaan yang Sehat dan SDM Berkapasitas

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang sehat dan mempunyai tujuan yang jelas adalah salah satu kunci kekuatan untuk bersuara. Keahlian di ranah yang disuarakan merupakan syarat penting pendukung perubahan dan kekuatan negosiasi. Tiga hal inilah yang menjadi pintu masuk bagi YAPPIKA bersama mitra utamanya, yaitu *Aceh Development Fund (ADF)* dan *Inspiring Managing for People's Action (IMPACT)*, dalam mengelola program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh. Di kalangan OMS Aceh, program ini dikenal dengan sebutan ANCORS (*Acehnese Civil Society Organizations Strengthening*).

Penguatan kelembagaan untuk terciptanya OMS yang sehat dilakukan melalui fasilitasi pengembangan, perubahan struktur serta perumusan aturan-aturan kelembagaan secara partisipatif terhadap 14 OMS di 6 kabupaten (Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Bireun, Pidie) dan 3 jaringan OMS di tingkat propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Program ini juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan perencanaan strategis lembaga untuk merumuskan arah lembaga yang jelas dan dipahami oleh seluruh staf atau anggotanya.

Selain penguatan kelembagaan, program ANCORS juga mendukung peningkatan kapasitas individu OMS mitra program dalam hal pengelolaan kelembagaan, pendampingan komunitas dan keahlian advokasi kebijakan



Beberapa aktivis PASKA melakukan audiensi dengan Bupati Pidie.

(pembuatan draft kebijakan, riset untuk advokasi, kampanye publik, negosiasi atau *lobby* dengan pemerintah) serta kapasitas pengembangan jaringan dan kampanye publik. Ranah advokasi kebijakan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan menjadi fokus perhatian program yang dijalani oleh mitra.

Kini, setelah tiga tahun perjalanan program ANCORS, para mitra telah menghasilkan 41 usulan kebijakan terkait pelayanan publik tingkat kabupaten dan propinsi, yaitu 9 rancangan Qanun, 1 Peraturan Gubernur, 4 Peraturan Bupati, 21 Peraturan Gampong dan 6 kertas posisi. Dua puluh tiga di antara usulan kebijakan tersebut telah dibahas dan disahkan oleh pihak legislatif. Lima mitra OMS propinsi dan 14 mitra kabupaten telah mempunyai struktur organisasi yang sehat, dimana ada kejelasan fungsi di masing-masing komponen organisasi. Fungsi masing-masing struktur pun relatif berjalan. Para mitra sudah mempunyai aturan kelembagaan terkait dengan standar keuangan dan peraturan umum kepegawaian (PUK) yang memuat aspek kesetaraan gender. Ketrampilan untuk mendukung kerja advokasi juga meningkat. Dua belas mitra program berhasil memproduksi film dokumenter, masing-masing satu buah film, untuk mendukung isu yang menjadi fokus advokasi.

Sementara itu dari sisi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan lembaga, para mitra menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian dengan alat TANGO (transparansi dan akuntabilitas NGO), dimana nilai rata-rata lembaga mitra program ANCORS meningkat antara 0 – 3 poin pada akhir program (2008) dibandingkan pada awal program (2006). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi organisasi membaik.

Keberhasilan tersebut cukup membanggakan, mengingat dalam waktu relatif singkat, sebagian besar OMS yang notabene adalah lembaga-lembaga relatif baru, punya kemauan dan mampu belajar cepat untuk membangun lembaga nirlaba yang cukup sehat serta suaranya pun diperhitungkan oleh pemerintah setempat. Harapannya, berbagai usulan kebijakan pelayanan publik dari arus bawah yang telah dihasilkan serta kapasitas pengelolaan lembaga yang kuat tersebut dapat berlanjut dan bermanfaat untuk masyarakat.

"YAPPIKA tidak asing bagi Aceh. Banyak kontribusi bagi kemajuan penguatan CSO, demokrasi, perdamaian dan rekonstruksi. Produk yang dicapai selama kiprahnya di Aceh dapat menjadi tonggak pembangunan Aceh di tahun 2009 dan selanjutnya. Masyarakat Aceh harus melihat peluang dan prospek pembangunan demi meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. YAPPIKA betul-betul membangun Indonesia dari Aceh."

Juanda Djamal, Manajer Komunikasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh

Ketekunan Menggulirkan Kesadaran Arus Bawah

Tahun 2006, Naima bersama dua orang kawannya di LPPM Aceh Besar, mulai mengelola kerja-kerja pendampingan masyarakat yang didukung oleh program ANCORS di 8 gampong Kabupaten Aceh Besar. Sebagai pendamping, kerja Naima mengajak diskusi masyarakat di gampong-gampong guna mengetahui berbagai persoalan dan peluang masyarakat serta bersama-sama mencari solusinya. Menurut Naima, program ANCORS sangat berbeda dengan program lain yang pernah ia tangani. Pasca tsunami, kebanyakan donor memberikan dukungan langsung dalam bentuk uang *cash* atau peralatan seperti mesin jahit. Masyarakat menjadi terbiasa dengan bantuan ini sehingga ketika ada orang masuk, mereka menanyakan apa bantuan yang akan diberikan. Di sinilah Naima menemui tantangan ketika menjalankan program ANCORS yang tidak membawa barang ataupun uang sepeserpun, namun hanya menawarkan ajakan untuk bersama-sama membuat perubahan pelayanan kesehatan.



Diskusi tentang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh LPPM di Puskesmas Lhoong Aceh Besar, melibatkan petugas puskesmas, dokter dan masyarakat.

Selama tiga bulan, ajakan Naima di gampong Payakamee dan Gapuy tidak direspon oleh warga setempat. Ia pun mendekati *Geuchik* dan kader PKK serta menyebarkan undangan pertemuan langsung kepada warga. Lambat laun, ada warga yang tertarik mengikuti pertemuan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi warga. Pada awalnya, semua peserta yang datang adalah perempuan. Setelah diselidiki jawabannya cukup mencengangkan, "kesehatan adalah urusan perempuan".

Pertemuan demi pertemuan ternyata berdampak pada kesadaran bahwa kesehatan bukan hanya urusan perempuan, namun juga laki-laki. Warga laki-laki pun kemudian hadir pada pertemuan rutin, bahkan mereka mengemukakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang biasanya dihadiri oleh laki-laki, ke depan harus melibatkan perempuan khususnya untuk pembahasan persoalan kesehatan.

Pelatihan strategi advokasi warga oleh LPPM kepada para kader posyandu mendorong minat warga semakin aktif berkumpul mendiskusikan persoalan-persoalan kesehatan yang mereka hadapi. Kesadaran akan hak pelayanan kesehatan yang berkualitas mendorong mereka berani melakukan perubahan. Misalnya, di gampong Payakamee, kelompok perempuan kader

posyandu yang telah mengikuti pelatihan strategi advokasi warga, membawa persoalan bidan desa yang sangat jarang menunaikan tugasnya melayani kesehatan masyarakat setempat di Poli Klinik Desa (Polindes). Persoalan ini sudah lama dikeluhkan warga setempat. Para kader menyampaikan persoalan tersebut pada pertemuan dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas.

Teguran diberikan Dinkes kepada pihak Puskesmas untuk mengatasi hal tersebut, namun selama beberapa waktu tidak ada perubahan kinerja bidan desa. Kader posyandu akhirnya melayangkan surat ke Dinas Kesehatan dan segera direspon pihak Dinas dengan mengirimkan teguran langsung melalui surat kepada bidan tanpa melalui Puskesmas. Berkat teguran tersebut, bidan pun bekerja sesuai dengan tugasnya melayani kesehatan masyarakat.

"Melalui beberapa kegiatan kerjasama antara CIDA dengan YAPPIKA dapatlah diamati bahwa semakin hari YAPPIKA telah semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai fasilitator yang handal dalam membantu dan mendorong mitra-mitra organisasi masyarakat sipil, khususnya di daerah, untuk ikut terlibat secara aktif dan positif di dalam proses-proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara lebih demokratis. Keep up the good works!"

Hari M. Basuki, Manajer Program the Canadian International Development Agency (CIDA)

Dari Warung Kopi ke Kantor Bupati



Baliho kampanye MATARADJA untuk advokasi pengadaan Unit Penanganan Keluhan Kabupaten Aceh Jaya.

MATARADJA adalah salah satu mitra program ANCORS di Kabupaten Aceh Jaya. Dengan dukungan program ANCORS, mereka melakukan advokasi pembentukan Unit Penanganan Keluhan (UPK) layanan administrasi umum di Kabupaten Aceh Jaya. Mereka bekerja di 7 gampong yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kec. Tenom, Kec. Krueng Sabee dan Kec. Jaya.

MATARADJA menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat dan lobby pemerintah untuk advokasi kebijakan tentang layanan administrasi umum di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal pengorganisasian, Nanda misalnya, staf pengorganisasian masyarakat (CO) MATARADJA,

pada awalnya cukup sulit masuk ke masyarakat di salah satu gampong bernama Curik. Rasa curiga masyarakat kepada Nanda cukup tinggi, kepercayaan masyarakat agak sulit terbangun. Wajar, situasi konflik panjang juga melanda Gampong tersebut. Lalu lalang lembaga donor yang berjanji memberikan bantuan ke gampong juga tinggi.

Gampong Curik terletak jauh dari pusat kota. Layanan listrik negara (PLN) belum masuk ke gampong ini. Kondisi ini menggerakkan Nanda untuk mengorganisir warga guna memperoleh penerangan listrik yang layak. Pendekatan intensif kepada masyarakat pun dilakukan. Media warung kopi, dimana warga dan Geuchik sering berkumpul, menjadi tempat strategis mengenalkan diri dan juga 'masuk' ke dalam lingkungan warga setempat. Obrolan yang dibangun banyak membahas soal-soal yang dihadapi warga. Persoalan warga menyangkut tidak adanya listrik menarik perhatian warga dan menumbuhkan kepercayaan warga kepada Nanda dan MATARADJA. Persoalan ini menjadi diskusi rutin di gampong yang kemudian memunculkan kebutuhan tim yang solid untuk melakukan aksi. Akhirnya terbentuklah tim advokasi warga. Tim ini bersama MATARADJA melakukan aksi dan dialog kepada pemerintah dan PLN di Calang Aceh Jaya untuk menuntut adanya penerangan listrik.

Bersama MATARADJA, kelompok masyarakat yang telah terorganisir ini mengembangkan usulan untuk dibentuk sebuah unit layanan penanganan keluhan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Unit tersebut tidak hanya sekedar menampung keluhan, namun juga mempunyai mekanisme penyelesaian serta ditetapkan melalui kebijakan pemerintah setempat sehingga ada jaminan kepastian pelaksanaannya. Usulan dan tuntutan tersebut ditanggapi serius oleh pemerintah setempat. Tim advokasi warga Curik – MATARADJA terus dilibatkan pemerintah setempat dalam penyusunan usulan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik. Saat ini listrik sudah menerangi Gampong Curik dan usulan kebijakan telah disahkan menjadi Peraturan Bupati No. 19 tahun 2008.

Mendulang Kepercayaan untuk Mendorong Kebijakan

Yayasan PAPAN merupakan mitra program ANCORS di Aceh Barat. Dengan dukungan program ANCORS, mereka melakukan advokasi peningkatan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Pendekatan advokasi dilakukan melalui dua aras. Pertama, membangun kesadaran kritis kelompok masyarakat peduli pendidikan. Kelompok ini kemudian



Talkshow radio oleh Yayasan PAPAN untuk kampanye perbaikan pelayanan pendidikan melalui penyusunan RAPBS partisipatif di Kabupaten Aceh Barat.

terkonsolidasi menjadi Forum Komunitas Peduli Pendidikan Aceh Barat. Kedua, membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) dan eksekutif untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar.

Yayasan PAPAN telah berhasil membangun jaringan masyarakat sipil yang mendukung advokasi terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 30% dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh. Pendampingan terhadap 68 komite sekolah di Aceh Barat telah meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara partisipatif. Saat ini, komite sekolah yang didampingi mampu menyusun RAPBS bahkan mampu menjelaskan esensi kebijakan anggaran pendidikan dan RAPBS kepada pihak lain.

Kepercayaan pemerintah kepada PAPAN pun tumbuh. Dinas Pendidikan maupun DPRK Aceh Barat (Komisi B bidang anggaran dan Komisi D bidang Pendidikan) menjadikan PAPAN sebagai mitra diskusi. Dorongan PAPAN untuk kebijakan peningkatan anggaran pendidikan direspon positif oleh pihak dewan. Kini, alokasi anggaran pendidikan Aceh Barat meningkat dari 8,7% pada tahun 2007 menjadi 18% pada tahun 2008. PAPAN juga diundang oleh pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Barat dan Penyusunan Rencana Strategis.

"YAPPIKA, bekerjasama dengan USC Canada, telah meraih sukses besar dalam melaksanakan program ANCORS dengan dukungan dana dari CIDA di Aceh selama tiga tahun ini. Program itu telah berhasil, melalui suatu pendekatan terpadu, responsif dan terstruktur, dalam meningkatkan kapasitas 14 OMS tingkat kabupaten/kota serta sejumlah jejaring OMS tingkat propinsi. Sebagai tim Cowater yang melakukan monitoring program ANCORS, saya tahu benar bahwa pendekatan "kemitrasejajaran" yang diterapkan Yappika sangat dihargai OMS yang dibantu melalui program tersebut. Paket pendekatan Yappika sangat layak direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia."

Tim Babcock, Cowater International Inc. Canada

Dari Lembaga Religius ke Ranah Advokasi

Rabithah Taliban Aceh (RTA) selama ini jauh dari kerja-kerja advokasi kebijakan. Masyarakat, eksekutif dan legislatif setempat mengenal RTA sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan keagamaan (pesantren). Keterlibatan RTA dalam program ANCORS membuat mereka dikenal oleh publik sebagai lembaga yang tidak hanya bergerak di dibang keagamaan, namun juga mempunyai kepedulian serta keahlian dalam advokasi kebijakan pendidikan.

Berawal dari kerja sama dengan program ANCORS, RTA mulai mengenal pengelolaan program menggunakan pendekatan RBM (*Result Based Management*), mengenal komputer, internet, belajar mengelola keuangan sederhana namun akuntabel dan menjalankan kerja-kerja advokasi kebijakan di ranah isu pelayanan pendidikan. Lembaga yang semula eksklusif ini pun membuka diri. Mereka membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan advokasi tersebut sehingga jaringan pun meluas, baik dengan masyarakat, sesama organisasi masyarakat sipil (OMS), sekolah-sekolah maupun pemerintah setempat.

Kedekatan dengan masyarakat membuahkan hasil. Bersama masyarakat, RTA berhasil membuat sebuah draft usulan kebijakan rancangan qanun Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan di Aceh Singkil yang diusulkan kepada DPRK Aceh Singkil. Dokumen yang diajukan tersebut menjadi bahan pembahasan di DPRK dan kini usulan kebijakan tersebut telah disahkan sebagai Qanun Pendidikan Aceh Singkil.

Pemahaman pendidikan yang semula bernafaskan pesantren berkembang ke praktek pendidikan formal. RTA fasih berbicara tentang komite sekolah, baik dari segi kebijakan yang memayunginya maupun dalam mengartikulasikan esensinya. Kefasihan ini memunculkan kepercayaan pemerintah setempat dengan meminta Direktur RTA-Singkil menjadi Ketua MPD (Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Subulussalam), sebuah jabatan politik yang strategis untuk pembangunan pendidikan.

Kapasitas lain pun mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya RTA masih buta penggunaan teknologi seperti internet, komputer serta peralatan audio visual. Pembiasaan menggunakan alat-alat pendukung tersebut selama perjalanan program ANCORS, membuat mereka mahir dan bahkan menjadikan internet sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak. Pemanfaatan komputer dalam mengelola keuangan turut mempermudah dan mendorong sistematisasi pengelolaan keuangan program. Kemajuan atas ketrampilan mengelola keuangan mendapat respon Pemerintah Kabupaten Subulussalam. RTA dipercaya sebagai bendahara untuk mengelola kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kabupaten.

"Saat ini kami sudah banyak berubah. Kami sekarang sudah familiar menggunakan istilah advokasi, kebijakan, komite sekolah, komputer, RBM. Dulu, sebelum terlibat mengelola program ini, kami belum tahu tentang itu. Keberadaan RTA semakin diperhitungkan oleh pemerintah, tidak lagi hanya dilihat dari urusan keagamaan namun juga dilihat dari kemampuan dan perhatian RTA dalam ranah isu pendidikan publik, dan lebih khusus lagi tentang kehijauan pendidikan di Aceh Singkil."

Teuku Makhsum, RTA

Alue Limeng, Menggerakkan Kerelawanan Mendorong Kebijakan



Proses belajar beratap langit SD MIS Cot Keutapang Alue Limeng sebelum memperoleh bantuan pembangunan ruang kelas baru.

Hiruk pikuk bantuan internasional pasca tsunami di Aceh mengalir ke wilayah-wilayah yang porak poranda. Wilayah lain pun seakan terlupakan. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Cot Keutapang Alue Limeng adalah sekolah dasar di desa Alue Limeng Kabupaten Bireun menjadi salah satu contoh yang tak tersentuh itu. Minimnya ruang belajar menyebabkan beberapa kelas terpaksa belajar beratapkan langit. Pohon yang tidak

begitu rindang menjadi peneduh dari terik matahari dan tak mampu menahan derasnya hujan.

Kondisi tersebut menggerakkan Perkumpulan BIMA yang terdiri dari aktivis muda untuk menggerakkan warga setempat mengatasi persoalan ini. Empat desa mereka organisir untuk bersama-sama mengatasi kondisi sekolah dasar tempat generasi penerus Bireun menimba ilmu. Sejumlah diskusi warga dilakukan oleh BIMA. Semangat muda itu disambut antusias oleh warga dan pihak sekolah. Beberapa rekomendasi hasil diskusi warga disampaikan oleh BIMA kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Bupati Bireun melalui *hearing* yang melibatkan warga setempat. Hasilnya, DPRK menjanjikan untuk pembangunan ruang sekolah dengan mengalokasikan dana Anggaran Pendidikan dan Belanja Kabupaten (APBK) di tahun 2008.

Sambil menunggu bantuan dari APBK, BIMA terus menggerakkan keswadayaan warga. Kerelawanan warga pun tumbuh. Mereka menyumbang uang dan bahan bangunan seperti batu, pohon dan kayu untuk menambah ruang kelas. Swadaya masyarakat tersebut berhasil menambah

satu ruang kelas. Selama proses pembangunan ruang kelas tersebut, BIMA mencoba mendatangkan Bupati dan Bank Dunia ke lokasi sekolah. Pada pertemuan tersebut Bank Dunia berkomitmen untuk membantu dan terealisasi dengan penambahan 3 ruang kelas baru. Sementara itu pihak DPRK memutuskan tidak memasukkan alokasi anggaran pembangunan sekolah dari APBK 2008, namun didorong melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) propinsi NAD. Dari dana DAK terealisasi dengan penambahan dua ruang kelas.

Pengalaman BIMA ini memberikan harapan bahwa kerelawanan warga masih menjanjikan untuk digerakkan di Aceh yang selama 4 tahun terakhir ini seakan tenggelam oleh melimpahnya bantuan internasional. Kerelawanan tersebut juga telah berhasil mempengaruhi kebijakan anggaran pemerintah walaupun masih dalam skala kecil. Tambahkan kalimat ini: Inisiatif BIMA untuk mengorganisir warga guna mengatasi persoalan minimnya fasilitas pendidikan pun berpengaruh kepada desa-desa di sekitar wilayah dampingannya. Warga meminta BIMA untuk mendampingi mereka, agar terjadi gerakan warga dan dukungan pemerintah untuk memperbaiki kualitas sekolah di dekat gampong mereka.

Benih-benih Aktivisme Kaum Muda

Menyemai Benih Aktivisme melalui Pers Kampus

Kesibukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami begitu luar biasa di tahun 2005 - 2008. Setelah mereda dengan mulai berakhirnya program bantuan internasional pada akhir 2008 ini, kesibukan beralih ke persiapan Pemilu 2009. Bursa caleg dari kalangan aktivis pun sangat marak. Berbagai kesibukan tersebut menyedot perhatian dan waktu para aktivis Ornop Aceh. Kaderisasi aktivis dari kaum muda seakan terlupakan.

YAPPIKA dan ACSTF melalui program ANCORS berupaya menjawab kekosongan proses regenerasi aktivis tersebut dengan penguatan lembaga pers kampus. Program ini mendukung 7 pers kampus yang berada di Univ. Syiah Kuala, Univ. Muhammadiyah Banda Aceh, Universitas Serambi Mekkah, Univ. Al Muslim Biruen dan Univ. Teuku Umar Meulaboh. Sebagian besar dari lembaga pers kampus tersebut dalam keadaan mati suri atau bahkan belum terbentuk sama sekali. Beberapa pelatihan terkait kemampuan jurnalistik, analisis sosial, gender dan isu hak dasar diberikan kepada para aktivis pers kampus. Sebuah tim penasehat (*advisory team*) yang bekerja secara *voluntary* dibentuk untuk memberikan masukan dan turut mengawal perkembangan pers kampus.

Masing-masing pers kampus cukup konsisten menerbitkan koran atau buletin kampus dan disambut positif oleh mahasiswa maupun kalangan rektorat. Kepercayaan diri dan daya kritis aktivis pers kampus pun meningkat jika dilihat dari kualitas tulisan dan berita-berita yang diangkat. Demikian pula dengan jaringan antar pers kampus. Nasruddin dan Zulakranaini dari Lensa Univ. Muhammadiyah mengatakan bahwa mereka mempunyai semangat baru untuk melakukan perbaikan di dalam kampus terlebih dahulu sebelum berbicara tentang Aceh secara lebih luas. Pendampingan yang dilakukan ACSTF serta berbagai pelatihan yang diterima diakui memberikan ruang bagi mereka bukan hanya tentang ketrampilan jurnalistik namun juga tentang gerakan mahasiswa yang saat ini semakin meredup. Semangat pun makin berkembang ketika Lensa diundang mengikuti konggres Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di kota Bau Bau (Sulawesi Tenggara) dimana Lensa ditunjuk menjadi simpul PPMI di Aceh guna mengembangkan gerak pers mahasiswa di Aceh.

Walaupun hanya dalam kurun waktu 9 bulan, gerak pers kampus cukup membanggakan. Benih-benih aktivisme telah disemai dan masih cukup panjang perjalanan untuk menyiram dan merawatnya hingga mendukung mereka untuk hidup dan terus berkembang. Masa depan aktivisme Aceh sebagai penyeimbang kekuatan politik yang kritis mungkin bisa berasal dari sini. Namun masih diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk internal manajemen kampus untuk membuat harapan itu tetap ada.

"Pendekatan YAPPIKA dalam hal peningkatan kapasitas adalah model yang bagus dan layak untuk ditiru. Metodologi YAPPIKA, yaitu dengan menyiapkan pelatihan yang diikuti pendampingan pasca pelatihan, memungkinkan CSOs mempraktekkan ketrampilan baru mereka, dan dalam waktu yang bersamaan pula memperoleh pendampingan dari staf YAPPIKA maupun tenaga ahli yang direkrutnya. Dukungan biaya operasional kelembagaan mitra juga disediakan, dan tidak hanya untuk kepentingan program saja. Hasil-hasil dalam laporan tahunan ini membuktikan keefektifan pendekatan yang telah dibangun YAPPIKA."

Celia Borgatti, Manajer Program Indonesia dan Timor Leste USC Canada

Keteguhan di Bawah Terik Matahari

Terik matahari yang menyengat di ubun-ubun, debu dan kadang bau anyir sungai hitam di Koja Jakarta Utara tak menyurutkan semangat para relawan YAPPIKA untuk bekerja. Lorong-lorong kampung mereka susuri dengan berjalan kaki, terkadang harus melintas sungai hitam berbau anyir dengan perahu getek untuk memotong jalan. Mereka penuh semangat mengkampanyekan kesehatan payudara dan hak pelayanan publik. Sebuah program kerja sama antara YAPPIKA dan Yayasan Kesehatan Kanker Payudara Jakarta (YKPJ) sejak tahun 2007.

Tahun 2008 ini, organisasi relawan di dalam YAPPIKA sangat solid dan masing-masing mampu menjalankan perannya, termasuk dalam melaksanakan program kampanye kesehatan payudara yang menjadi arena 'bermain' mereka. Proses regenerasi dan transfer keahlian berjalan mulus. Sistem magang mereka terapkan untuk melatih relawan baru dengan langsung mengikutsertakannya turun lapangan. Kepedulian sosial mereka-



Dengan sabar relawan YAPPIKA melayani memandu sosialisasi jaminan pelayanan kesehatan warga miskin dan kanker payudara.

pun terasah ketika hampir setiap hari bersama masyarakat di sela-sela kesibukan kuliah, mendengar ketakutan masyarakat seandainya sakit, mendampingi pasien yang teridentifikasi kanker untuk memperoleh jaminan kesehatan GAKIN dan kadang bersitegang dengan petugas kesehatan.

Keceriaan para relawan bersama masyarakat, kedekatan dengan para aparat kelurahan dan kecamatan Koja membuat banyak pihak tersentuh. Benih-benih aktivisme mereka telah tersemai tanpa banyak kata dan teori. Kerja keras yang telah membuat kulit para relawan sedikit gelap karena teriknya matahari membuahkan hasil. Kini, lebih dari 2000 perempuan di Kecamatan Koja telah mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan payudara dan informasi tentang jaminan pelayanan kesehatan warga miskin. Pengakuan pun disampaikan oleh Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Jakarta, Drs. Sri Kuswantono W. M.Si. Menurutnya YAPPIKA telah menjadi salah satu ajang belajar dan mengasah kepedulian mahasiswanya yang banyak tergabung sebagai relawan. Daya kritis dan keberanian bicara dengan argumen yang jelas di kampus pun meningkat lebih cepat dibandingkan mahasiswa yang hanya berdiam di arena kampus.

"Saya sangat bangga dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh para relawan YAPPIKA. Mereka masih mahasiswa, namun mau menyempatkan waktu untuk turun ke lapangan di tengah masyarakat untuk mengkampanyekan tentang bahaya kanker payudara dan bagaimana masyarakat miskin seharusnya memperoleh hak jaminan kesehatan. Mereka saya anggap seperti anak sendiri. Kerja-kerja tanpa pamrih ini semakin menguatkan bahwa kerelawanan itu masih ada dan tumbuh serta menjadi ajang belajar buat anak-anak muda."

Anna, Bidan Puskesmas Kelurahan Tugu Utara

Strategi Peningkatan Kapasitas yang Unik di Program ANCORS

Program ANCORS mencoba melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan OMS secara bertingkat dan paralel. YAPPIKA memberikan dukungan langsung kepada dua mitra propinsi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi penyedia layanan (*service provider*) OMS, yaitu Aceh Development Fund (ADF) dan *Inspiration for Managing People's Action* (IMPACT). Kedua lembaga ini disiapkan untuk memberikan berbagai pelayanan peningkatan kapasitas kepada OMS mitra di 6 kabupaten (Aceh Singkil, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Bireun, Pidie).

Kemampuan mengelola dana hibah untuk OMS dikembangkan di ADF, yaitu untuk melayani 14 OMS mitra di 6 kabupaten. Sementara itu kemampuan memberikan layanan peningkatan kapasitas OMS berupa penyehatan struktur kelembagaan (*strategic planning*, penyusunan prosedur standar operasi lembaga seperti Pedoman Umum Kepegawaian/PUK dan Keuangan, internalisasi kesetaraan gender), teknik fasilitasi pertemuan dan advokasi kebijakan (penyusunan draft kebijakan, *lobby*, dialog dengan pengambil kebijakan dan pengorganisasian masyarakat) dikembangkan di IMPACT untuk melayani kebutuhan peningkatan kapasitas 14 mitra program ANCORS di kabupaten. Pada awal program, kebutuhan peningkatan kapasitas mitra OMS kabupaten yang belum bisa diberikan oleh IMPACT, dikelola langsung oleh YAPPIKA baik terjun sendiri maupun meminta bantuan konsultan dari lembaga lain atau individu. Namun selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh IMPACT secara mandiri sejalan dengan terbangunnya kapasitas para fasilitator IMPACT.

Selama perjalanan program, pendampingan secara terus menerus terhadap OMS mitra kabupaten dilakukan oleh para fasilitator wilayah yang dikelola IMPACT. Refleksi dan evaluasi di masing-masing lembaga maupun di antara para mitra program selalu dilakukan. Semua upaya tersebut dilakukan guna memastikan kapasitas yang telah diberikan atau ditingkatkan benar-benar diterapkan di lapangan dan terinternalisasi di lembaga masing-masing.

Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan OMS ini tidak menjadikan hubungan antar lembaga pemberi layanan dengan penerima

layanan selayaknya guru – murid. Namun justru berkembang menjadi hubungan kemitraan dan menjadi sebuah tim yang saling berbagi informasi, pembelajaran dan semangat untuk mendorong perbaikan kebijakan pelayanan publik di 6 kabupaten di Aceh.

"Selama ini saya mengenal YAPPIKA sebagai sebuah institusi yang concern dalam memperjuangkan hak-hak sipil terutama isu HAM dan demokrasi. Dalam konteks Aceh, YAPPIKA sudah berkiprah selama konflik dan banyak terlibat dalam berbagai isu strategis. Bagi saya, keberadaan YAPPIKA telah mendorong lahirnya perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat menuju terwujudnya tatanan madani."

Khairul Amal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Kelembagaan yang Sehat untuk Melanjutkan Misi Keadilan Gender

Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) adalah salah satu organisasi perempuan yang telah cukup lama berkiprah di Aceh. Persoalan kelembagaan sempat mengguncang keberadaan organisasi ini di tahun 2007. Kekhawatiran beberapa pihak pun muncul terhadap keberlanjutan lembaga yang telah berkontribusi terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan di Aceh ini. Kiprahnya dipandang penting untuk dilanjutkan di masa datang guna mendorong tumbuh kembangnya kesadaran dan praktek keadilan gender di Aceh.

Kadaan tersebut direspon oleh YAPPIKA melalui program ANCORS dengan memberikan dukungan kepada KKTGA, khusus untuk memperbaiki kesehatan kelembagaannya. Dana yang dikucurkan ditujukan untuk membiayai rapat-rapat pengurus, perencanaan strategis, diskusi rutin yang melibatkan para anggota KKTGA serta memperbaharui basis data organisasi anggota sebagai salah satu alat untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Kini, struktur kelembagaan dan lingkup tugas serta tanggungjawab masing-masing bagian telah direvisi dan disepakati bersama. Struktur baru tersebut memastikan adanya mekanisme *check and balance* di dalam KKTGA.

Proses perumusan perbaikan kelembagaan yang dilakukan secara partisipatif melibatkan pengurus, eksekutif dan anggota KKTGA berhasil menumbuhkan kembali rasa kepemilikan dan perhatian terhadap lembaga. Proses-proses tersebut juga telah membantu mencairkan batas-batas komunikasi yang selama ini terjadi sehingga kesetaraan pun dirasakan oleh para staf. Kini, dengan kelembagaan yang sehat, KKTGA mantap untuk menapaki hari esok, untuk terus memperjuangkan keadilan gender di negeri Serambi Mekah. Dan bagi YAPPIKA, proses-proses perbaikan tersebut merupakan wujud praktek demokrasi internal lembaga yang bermakna. Ujian demokrasi adalah kala kita melakukannya dan bukan sekedar menyuarakannya di ranah publik.

Ujung Nasib RUU Pelayanan Publik Di Tahun 2008

Ketok Palu yang Tak Kunjung Tiba

Setelah tiga tahun pembahasan yang panjang dan melelahkan, sidang DPR RI akhir tahun 2008 pun ditutup dengan tidak mengubah status RUU pelayanan publik, masih sebagai draft kebijakan. Tidak hanya mendung yang menggelayut di penghujung tahun 2008, kekecewaan berbagai pihak dan catatan buruk berbagai media massa atas kinerja legislatif pun menjadi kelabu yang menutup akhir tahun 2008.



Diskusi Publik Advokasi RUU Pelayanan Publik.

Janji Panitia Kerja (Panja) RUU Pelayanan Publik yang akan menyelesaikan pembahasan RUU pelayanan publik dan mengesahkannya di akhir tahun 2008 menjadi pijakan bagi masyarakat peduli pelayanan publik (MP3) untuk melakukan pengawalan intensif sepanjang tahun 2008. Tujuannya jelas, mempengaruhi perubahan pasal-pasal yang krusial bagi kepentingan publik, juga memastikan agar janji Panja untuk mengesahkan RUU pelayanan publik tidak melewati masa sidang tahun 2008.

Berbagai upaya dilakukan oleh MP3 untuk mengawal pembahasan RUU pelayanan publik. Agenda advokasi sepanjang tahun 2008 dilakukan dengan memfokuskan pada; penguatan substansi, kampanye publik, *lobby/asistensi* substansi kepada anggota Panja dan tim perumus (Timus) serta pemantauan sidang-sidang pembahasan RUU pelayanan publik. Keputusan Panja bahwa sidang-sidang pembahasan RUU pelayanan publik dinyatakan terbuka untuk umum benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh MP3. Bahkan sampai pada proses di Timsin (tim sinkronisasi).

Pembahasan RUU Pelayanan Publik sudah menyelesaikan hampir semua pasal-pasal. Hingga akhir pembahasan, substansi RUU Pelayanan Publik memang belum bisa disebut sempurna. Tetapi sebagai sebuah proses, perubahan-perubahan yang ada dalam pasal-pasal RUU Pelayanan Publik sudah cukup layak untuk diimplementasikan. Aturan-aturan di dalamnya cukup kuat digunakan sebagai basis hukum bagi upaya mendorong

perubahan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Kuncinya terletak pada, kemauan DPR untuk segera mensahkan dan kemauan yang kuat dari Pemerintah untuk segera mengimplementasikan. Sambil proses pendidikan penyadaran hak dan sosialisasi kepada masyarakat juga dijalankan.

Kini, musim Pemilu legislatif telah berakhir. Demikian juga kesibukan para Caleg yang juga didalamnya banyak anggota DPR RI untuk ikut berlaga di Pemilu legislatif pun selesai sudah. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi anggota DPR untuk tidak menyegerakan pengesahan RUU pelayanan publik. Masyarakat Indonesia menantikan implementasi RUU tersebut sebagai payung hukum yang diharapkan dapat melindungi hak-hak mereka atas pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.

Oleh: Sutoro Eko

(anggota tim evaluator independen program ANCORS)

Respon global terhadap Aceh pasca tsunami bukan hanya masuk ke ranah *livelihood*, tetapi juga masuk ke ranah *local governance reform*. Sebagian besar lembaga donor mendorong *governance reform* di Aceh dengan pendekatan yang mengutamakan negara (*state first*), yakni melakukan *capacity building* dan asistensi terhadap pemerintah daerah, sementara keterlibatan masyarakat hanya bersifat komplementer.



Penyerahan draft Qanun Kesehatan oleh LPPM kepada Pemerintah Aceh Besar.

YAPPIKA dengan program ANCORS masuk ke ranah *governance reform* dengan mengutamakan masyarakat sipil (*civil society first*). Tetapi pendekatan itu tidak hanya masuk ke arena "belajar" untuk menempa kapasitas dan "bergerak" di ranah masyarakat sipil semata, melainkan juga mendorong OMS "bersenyawa" dengan pemerintah daerah untuk mendorong perubahan kebijakan daerah. Bersenyawa bukan berarti menjalin hubungan yang "mesra" atau kolusif, tetapi OMS tetap bersikap kritis terhadap pemerintah, apalagi terhadap kebijakan yang salah urus, seraya duduk bersama untuk melahirkan berbagai kebijakan yang baik.

Kehadiran ANCORS tentu membawa dana yang masuk ke *resource organizations* (seperti IMPACT dan ADF) di level provinsi dan 14 OMS di level kabupaten. Aliran dana itu dikemas dengan cara yang canggih dan bermakna. *Pertama*, caranya bukan memberi (*giving*) seperti dermawan, bukan pula belanja (*shopping*) yang kini dilakukan oleh mayoritas lembaga donor, tetapi dengan cara *investing*, yakni mengalokasikan dana untuk investasi sosial penguatan masyarakat sipil di Aceh. *Kedua*, dana ANCORS bukan bersifat reaktif (mendukung program-program OMS yang baik) dan bukan pula bersifat kompensatoris (memberi dukungan dana kepada organisasi strategis karena keterbatasan pendanaan), tetapi bersifat *intervensionis*. Pendekatan *intervensionis* ini bukan dalam bentuk campur tangan yang mematikan, tetapi

mengandung tiga makna: (a) Dana yang memungkinkan organisasi mengubah diri atau melakukan inovasi atas model-model layanan yang diberikan; (b) mendukung konsolidasi organisasi agar lebih kuat dan luas pengaruhnya; dan (c) menciptakan tata hubungan baru antara OMS dengan pemerintah yang lebih demokratis, pemerintah menjadi lebih inklusif dan responsif.

Selama dua-tiga tahun terakhir, ANCORS telah menabur benih dan membiakkan bunga perubahan. Tetapi OMS di Aceh tentu masih mempunyai tantangan bagaimana melakukan transformasi berkelanjutan dari menabur benih dan membiakkan bunga itu menjadi memetik buah: pemerintahan lokal yang demokratis dan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, dalam menabur benih dan membiakkan bunga perubahan, ANCORS menampilkan beberapa sisi pembelajaran bagi OMS, lembaga donor dan pemerintah daerah.

Kalangan OMS semakin canggih, seraya terus belajar, mencari dan memperkuat kapasitasnya dalam membangun organisasi dan advokasi perubahan sosial di ranah masyarakat dan pemerintah daerah. Strategi yang ditempuh OMS tidak lagi *jadul*, atau bersikukuh dengan cara melawan pemerintah. Sejauh ini OMS menempuh empat langkah yang saling terkait dan memperkuat: (a) Kerja membangun basis di komunitas, baik untuk pembelajaran-pengatahuan, menggali *voice* masyarakat dan membangun legitimasi OMS di hadapan masyarakat; (b) kerja-kerja teknokratis atau manajemen pengetahuan melalui penelitian empirik yang tentu menggunakan metodologi penelitian yang bersifat akademik, sekaligus juga menyiapkan naskah kebijakan; (c) kerja-kerja pengorganisasian gerakan sebagai kelanjutan dari kerja-kerja di tingkat basis, yang mencakup pengorganisasian komunitas dan perluasan (*link up*) jaringan pada skala yang lebih luas sampai di level kabupaten; dan kerja-kerja politik melalui *lobby* dan dialog untuk menghasilkan dan/atau mengesahkan kebijakan daerah.

Pengalaman ANCORS tentu menjadi pelajaran penting bagi donor dalam mendorong *governance reform* di Indonesia. Pada akhir tahun 2004, multidonor melakukan evaluasi pendanaan, yang menghasilkan temuan utama: dukungan dana pada NGOs sangat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat masyarakat sipil, tetapi tidak efektif untuk mengubah kebijakan (*policy reform*). Mengapa? Ada dua jawaban menurut multidonor. Pertama, kapasitas NGOs masih lemah, dan bahkan menggunakan cara-cara tradisional yang sulit diterima pemerintah. Kedua, dalam tubuh NGOs rentan terjadi konflik internal yang mengganggu akuntabilitas dan efektivitas program. Dilatari oleh kelemahan NGOs dan pemerintah Indonesia yang semakin terbuka, maka multidonor itu merekomendasikan untuk mengubah strategi pemberian donor, yakni dari *civil society first* yang menonjol pada tahun 1998-2004 menjadi *state first* mulai 2005 hingga sekarang.

Ortodoksi donor itu sebenarnya terbantah dengan pengalaman ANCORS. Karena itu lembaga donor sebaiknya meninggalkan strategi *state first* menuju strategi yang berimbang antara masyarakat dan negara, sekaligus strategi membangun persenyawaan antara masyarakat dan negara. Selain itu, gaya “belanja” yang sekarang diterapkan sebaiknya digantikan dengan gaya “investasi”.

ANCORS juga memberi pelajaran bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan OMS. LSM adalah “penjual bangsa” LSM adalah “agen asing” merupakan cara pandang *jadul* dari pemerintah yang sebaiknya dikikis habis. Pengalaman ANCORS di Aceh menunjukkan bahwa cara pandang pemda terhadap OMS tengah berubah, meskipun belum total. Pemda membuka mata hatinya bahwa NGOs memberikan bantuan dan dukungan yang sangat besar kepada warganya, mulai dari bantuan pengembangan livelihood, pengembangan kapasitas perangkat pemerintah hingga kerangka kebijakan. Pemda merasakan bahwa dirinya terbatas, sementara di ranah NGOs mempunyai potensi besar, sehingga mendorong pemda membuka diri (inklusif) dan bekerjasama dengan NGOs.

Saya selalu yakin bahwa organisasi masyarakat sipil berperan besar dalam menabur benih dan membiakkan bunga perubahan. Daerah yang memiliki organisasi dan ruang masyarakat sipil yang kuat akan membuat daerah itu lebih inklusif, beradab dan bermakna bagi rakyat. Sebaliknya daerah yang miskin masyarakat sipil akan didekatkan dengan korupsi, kebijakan yang salah urus dan pemerintah yang kurang bermakna bagi rakyat.

“Semoga YAPPIKA bisa menjadi contoh dan model Ornop di Indonesia yang akuntabel dan mampu memberikan alternatif.”
Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

PRODUK KEBIJAKAN YANG BERHASIL DIDORONG OLEH MITRA PROGRAM ANCORS

Setelah 3 tahun perjalanan program, para mitra telah menghasilkan 41 usulan kebijakan terkait pelayanan publik tingkat kabupaten dan propinsi, yaitu 9 usulan Rancangan Qanun, 1 Peraturan Gubernur, 4 Peraturan Bupati, 21 Peraturan Gampong dan 6 kertas posisi. Dua puluh tiga di antara usulan kebijakan tersebut telah disahkan.

Usulan Kebijakan oleh Mitra Program ANCORS:

1. Usulan rancangan qanun tentang pendidikan Aceh Besar (YPSDI)
2. Usulan rancangan qanun tentang kesehatan Aceh Besar (LPPM)
3. Usulan rancangan qanun tentang Adminduk Pidie (Perak)
4. Usulan rancangan qanun tentang kesehatan Bireun (LSPENA)
5. Usulan rancangan qanun tentang pendidikan di Singkil (RTA)
6. Usulan rancangan qanun tentang kesehatan di Singkil (DAUN)
7. Usulan rancangan qanun tentang Penyelenggaraan Pendidikan (ADF & Koalisi NGO HAM)
8. Usulan rancangan qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (ADF & ACSTF)
9. Usulan rancangan qanun tentang Kesehatan (GERAK Aceh)
10. Usulan rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Mekanisme Seleksi Penerima, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan (ADF, Forum LSM Aceh dan YAPPIKA)
11. Dua puluh satu (21) peraturan gampong di Aceh Besar (YPK)
12. Dua (2) Peraturan Bupati Aceh Barat urusan Adminduk (YPK)
13. Peraturan Bupati tentang unit pengaduan dan penyelesaian masalah di Aceh Jaya (MATARADJA)
14. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Keluhan Pelayanan Publik di Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat
15. Kertas posisi atas APBK sektor kesehatan dan pendidikan Aceh besar (Pugar),
16. Kertas posisi pelayanan kesehatan reproduksi (Flower Aceh Barat)
17. Kertas posisi peningkatan kualitas sektor pendidikan di Aceh Jaya (Masif)
18. Kertas posisi usulan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Komunitas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 (PAPAN)
19. Kertas posisi APBK KUA/PPAS Kabupaten Aceh Barat tahun 2009 (PAPAN)
20. Kertas posisi tentang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan daerah (LSPENA)

Usulan Kebijakan yang telah Disahkan:

1. Qanun Kab. Aceh Singkil No. 10 tahun 2008 tentang SPM (Standard Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan, yang diusulkan oleh Yayasan DAUN disahkan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2008, lembar pengesahan no. 167 tahun 2008.
2. Qanun Kab. Aceh Besar No. 13 tahun 2008 tentang Qanun Kesehatan, diusulkan oleh LPPM telah disahkan pada tanggal 29 November 2008.
3. Qanun Propinsi NAD No. 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Gubernur NAD No. 5 Tahun 2008 tentang Administrasi Pendidikan
5. Lima belas (15) peraturan gampong di Aceh Barat (YPK)
6. Peraturan Bupati No. 6 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Insentif Aparatur Pemerintah Gampong di Aceh Barat
7. Peraturan Bupati No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Layanan Pengaduan Kecamatan (PLPK) dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Keluhan Pelayanan Publik
8. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya No. 19 tahun 2008 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaduan Keluhan Masyarakat, yang diajukan oleh MATARADJA.
9. Peraturan Bupati Aceh Barat No. 421.3/44/2008 tentang Penertiban Siswa pada Jam Belajar di luar Pekarangan Sekolah, yang diusulkan oleh Yayasan PAPAN disahkan pada tanggal 28 Desember 2007.

SINERGI KERJA YAPPIKA DALAM KEMITRAAN

Dalam mewujudkan visi dan misinya, YAPPIKA menjalankan berbagai program yang selalu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga lain maupun para individu. Selama periode April 2008 – Maret 2009, kemitraan yang telah kami bangun, di antaranya adalah:

Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh

YAPPIKA bekerjasama dengan USC Canada dan *Canadian International Development Agency* (CIDA) memberikan dukungan dana maupun asistensi teknis kepada 16 lembaga mitra di Nanggore Aceh Darussalam, yaitu:

1. **Banda Aceh:** Aceh Development Fund (ADF), *Inspiration for Managing People's Action* (Impact), Forum LSM Aceh, Kelompok Kerja untuk Transformasi Gender Aceh (KKTGA), *Acehnese Civil Sociey Organization Strengthening* (ACSTF)
2. **Kabupaten Aceh Besar:** Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Aceh (LPPM), Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani (YSPDI)
3. **Kabupaten Pidie:** Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA), Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Ekonomi Rakyat (PERAK)
4. **Kabupaten Bireun:** Bina Masyarakat (BIMA), Lembaga Swadaya Pembangunan Nasional (LSPENA)
5. **Kabupaten Aceh Jaya:** Masyarakat Transparansi Peduli Aceh Jaya (MATARAJA), Masyarakat Partisipasi Aceh Jaya (MP)
6. **Kabupaten Aceh Barat:** Flower Aceh Meulaboh, Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK) Yayasan Pembela Petani dan Nelayan (PAPAN)
7. **Kabupaten Singkil:** Yayasan Demokrasi untuk Negeri (DAUN), Rabithah Thaliban Aceh (RTA).

Advokasi RUU Pelayanan Publik

YAPPIKA bekerja sama dengan Yayasan TIFA melakukan advokasi RUU Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dimana YAPPIKA berperan sebagai sekretariat jaringan. Jaringan MP3 saat ini beranggotakan 33 lembaga yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Pemanfaatan IMS dalam Program ACCESS Tahap II

YAPPIKA bekerja sama dengan program ACCESS Tahap II melakukan penilaian Index Masyarakat Sipil (IMS) di 8 Kabupaten (Goa, Takalar, Bau Bau, Buton Utara, Bima, Dompu, Timor Tengah Selatan/TTS dan Kupang) serta melakukan kaji ulang IMS di 8 kabupaten yang telah menjadi wilayah kerja program ACCESS tahap I (Jeneponto, Bantaeng, Muna, Buton, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat dan Sumba Timur)

Program Deteksi Dini Kanker Payudara

YAPPIKA bekerja sama dengan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) melakukan program deteksi dini kanker payudara di Kecamatan Koja Jakarta Utara. Bagi YAPPIKA, program merupakan salah satu pintu masuk untuk mengkampanyekan hak pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin.

Pelibatan Relawan

YAPPIKA melibatkan relawan, khususnya dari kalangan muda dalam kerja-kerja yang dilakukannya. Jumlah relawan yang aktif pada periode April 2008 – Maret 2009 sebanyak 30 orang. Sebagian besar relawan adalah mahasiswa dan atau fresh graduate dari 5 perguruan tinggi di Jakarta dan Depok.

MAJALAH DAN BUKU TERBITAN YAPPIKA PERIODE APRIL 2008 - MARET 2009

Majalah

YAPPIKA didukung oleh USC Canada dan CIDA melalui program ANCORS menerbitkan majalah berbahasa Indonesia dengan tajuk ALIANSI sejak bulan November 1999 hingga saat ini. Majalah ini terbit tiap 2 bulan. Pada periode April 2008 – Maret 2009, ALIANSI telah terbit 6 kali dengan beragam tema, yaitu:

1. Edisi XLV April - Mei 2008, Potret Pelayanan Publik di Aceh
2. Edisi XLVI Juni - Juli 2008, Menuju Aceh Baru Pasca BRR
3. Edisi XLVII Agustus – September 2008, 3 tahun MOU Helsinki Aceh Damai
4. Edisi XLVIII Oktober – November 2008, Bila Aktivis Aceh Masuk Parlemen
5. Edisi XLIX Desember – Januari 2009, Mimpi Tentang Aceh Baru
6. Edisi XLX Februari – Maret 2009, Dari Perjuangan Bersenjata ke Panggung Parlemen

Buku

YAPPIKA dan mitra didukung oleh USC Canada dan CIDA melalui program ANCORS menerbitkan beberapa buku pada periode April 2008 – Maret 2009, yaitu:

1. **Manual Pengarusutamaan Gender (PUG)**, Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program ANCORS, 2009, oleh tim YAPPIKA
2. **TITIAN, Antologi Cerita Pendek dan Kerakyatan**, 2008; oleh Dyah Merta, Happy Salma, dkk; kerjasama YAPPIKA dengan Lembaga Kreativitas Kemanusiaan
3. **Mengungkap Kondisi Pelayanan Publik 6 Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam**, studi kasus pelayanan bidang pendidikan kesehatan dan kependudukan, 2009; oleh mitra Program Acehness Civil Society Organizations Strengthening (ANCORS)
4. **Panduan Pelatihan Gender**, oleh Suraiya Kamaruzzaman & Cut Risma Aini 2008. Diterbitkan oleh IMPACT
5. **Panduan Analisa Kebijakan Publik**, oleh Alamsyah, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

6. **Panduan Pelatihan Organizational Development and Management Strategic**, oleh Fauzy Abdullah, Handoko Utomo dan tim fasilitator IMPACT, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

7. **Panduan Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat**, oleh Eenk Darmi, Iskandar, dkk, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

8. **Panduan Pelatihan Perencanaan Strategis Masyarakat Sipil**, oleh Aulia, Nursiti, dkk, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

9. **Panduan Pelatihan Negosiasi, Lobby dan Membangun Opini untuk Mengubah Kebijakan Publik**, oleh Suraiya Kamaruzzaman, Ridha Ramli, dkk, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

10. **Panduan Pelatihan: Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Program**, oleh Afrizal Tjoetra, Nurdin El Jodas, dkk, 2008. Diterbitkan oleh IMPACT

11. **Kumpulan Artikel Pers Kampus**, 2009. Diterbitkan oleh ACSTF

12. **Kumpulan Peraturan Pers Kampus (Lensa, Lampu, Q-Ta, Sinar Post, Suara Al-Muslim)**, 2009. Diterbitakan oleh ACSTF

13. **Sehat itu Murah**, oleh Hendri Syarizal, Saiful Isky dan Subuki Yusuf, 2008. Diterbitkan oleh LPPM Aceh Besar.

Film Dokumenter

YAPPIKA dan mitra Program ANCORS yang didukung oleh USC Canada dan CIDA memproduksi film dokumenter yang mengangkat isu advokasi yang dilakukan mitra program. Proses pembuatan dilakukan oleh mitra dan YAPPIKA dengan asistensi dari lembaga profesional dalam hal produksi film dokumenter. Dukungan pendanaan diberikan untuk peralatan produksi film, pelatihan dan proses produksi. Produk yang dihasilkan dari dukungan tersebut adalah:

1. Dua belas (12) buah film dokumenter mitra program ANCORS
2. Tiga (3) buah film tema pelayanan publik yang diproduksi oleh YAPPIKA, yaitu tema pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan
3. Satu (1) buah film dokumenter perjalanan program ANCORS

YAPPIKA –ALIANSI MASYARAKAT CIPIL UNTUK DEMOKRASI
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2008	2007
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	1,541,999,250	2,833,975,424
Investasi	3b,5	380,999,350	-
Piutang Program-bersih	3c, 6	600,240,100	219,490,754
Piutang Lain-Lain	7	96,138,574	214,848,797
Uang muka	8	586,931,762	1,266,862,851
Jumlah aktiva bersih		3,183,532,957	4,535,177,826
Aktiva tidak lancar			
Aktiva tetap	3d, 9		
Nilai Perolehan		585,591,031	589,681,031
Akumulasi penyusutan		577,086,613	573,728,905
Jumlah Aktiva tidak Lancar		8,504,418	15,952,126
Jumlah Aktiva		3,214,813,454	4,551,129,952

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA –ALIANSI MASYARAKAT CIPIL UNTUK DEMOKRASI
Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2008	2007
Kewajiban dan aktiva bersih			
Kewajiban			
Kewajiban lancar			
Hutang lain-lain	10	402,333,791	444,383,779
Hutang Pajak	11	77,094	31,343
Jumlah kewajiban lancar		402,410,885	444,415,122
Aktiva bersih			
Sisa dana	3e		
Terikat	12a	892,450,354	1,731,156,042
Tidak Terikat	12b	1,919,952,215	2,375,558,788
Jumlah aktiva bersih		2,812,402,569	4,106,714,830
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih		3,214,813,454	4,551,129,952

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA –ALIANSI MASYARAKAT CIPIL UNTUK DEMOKRASI
Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2008		2007	
		Terikat	Tidak Terikat	Jumlah	Jumlah
Penerimaan					
Penerimaan Program	13	13,305,168,147	-	13,305,168,147	15,409,308,408
Penerimaan lain-lain		-	292,983,295	292,983,295	555,018,336
Jumlah Penerimaan		13,305,168,147	292,983,295	13,598,151,442	15,964,326,744
Pengeluaran	14				
Canadian International Development Agency (CIDA)		12,011,468,722	-	12,011,468,722	9,410,407,158
CSO (Capacity Building in Aceh)					
Canadian International Development Agency (CIDA) melalui		1,131,787,342	-	1,131,787,342	5,391,825,375
Service Committee of Canada (USC – Canada) – PPD Phase II		-	-	-	1,483,522,367
ACCESS		447,539,813	-	447,539,813	420,968,759
Access Bridging		-	-	-	37,461,752
ACCESS Index National		69,124,050	-	69,124,050	11,447,955
Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPPJ)		420,049,555	-	420,049,555	-
United Nation Development Programme - Assessment on International Assistance		140,565,283	-	140,565,283	-
in Election 2009		-	671,928,938	671,928,938	352,348,834
TIFA Foundation – Advokasi Pelayanan Publik		-	-	-	-
Administration		-	-	-	-
Total pengeluaran		14,220,534,765	671,928,938	14,892,463,703	17,107,982,200
Sisa dana, tahun berjalan		(915,366,618)	(378,945,643)	(1,294,312,261)	(1,143,655,456)
Sisa dana, awal		1,731,156,042	2,375,558,788	4,106,714,830	5,384,105,636
Koreksi atas sisa dana	12	-	-	-	(133,735,350)
Reclassification atas sisa dana	12	76,660,930	(76,660,930)	-	-
Sisa dana, akhir		892,450,354	1,919,952,215	2,812,402,569	4,106,714,830

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA –ALIANSI MASYARAKAT CIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan arus kas

Per 31 Desember 2008 dan 2007

(Dalam Rupiah)

	2008	2007
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	(1,294,312,261)	(1,143,655,456)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas		
Yang digunakan untuk aktivitas operasi		
Koreksi atas sisa dana	-	(133,735,350)
Penyusutan	8,797,708	38,757,873
Kerugian atas penghapusan aktiva tetap-	1,147,042	
Kerugian atas dana investasi	304,000,650	-
Kenaikan(penurunan) pada		
Piutang Program	(380,749,346)	198,903,525
Piutang Lain-lain	118,710,223	178,165,173
Uang muka	679,931,089	730,731,415
Kenaikan (penurunan) pada:		
Hutang lain-lain	(42,049,988)	(180,770,935)
Hutang pajak	45,751	(29,956,910)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(605,626,174)	(340,413,623)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Investasi	(685,000,000)	-
Perolehan aktiva tetap	(1,350,000)	(5,900,000)
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(686,350,000)	(5,900,000)
Penurunan dalam kas dan setara kas	(1,291,976,174)	(346,313,623)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	2,833,975,424	3,180,289,047
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	1,541,999,250	2,833,975,424

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

LAPORAN AKTIVITAS & SALDO DANA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

(dalam rupiah)

KETERANGAN	2008	2007
PENERIMAAN		
Kontribusi Dana dari Lembaga Donor		
1 USC - Canada (PPD)	150,728,801	5,456,701,500
2 USC - Canada (ANCORS)	12,139,551,174	7,779,647,831
3 ACCES	-	1,491,567,114
4 Patnership	-	127,418,817
5 OXFAM	-	39,964,600
6 The Asia Foundation	-	34,984,546
7 ACCES-Bridging Fund	423,671,572	447,324,000
8 Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)	56,405,100	31,700,000
8 UNDP	364,210,000	-
9 TIFA-Foundation-Advokasi Pelayanan Publik	170,601,500	-
9 Pendapatan Bunga Bank	13,883,032	-
Sub Total Kontribis Lembaga Donor	13,319,051,179	15,409,308,408
YAPPIKA	279,100,263	555,018,336
Total Penerimaan	13,598,151,442	15,964,326,744
PENGELUARAN		
Manajemen Kantor		
Gaji untuk Manajemen	837,220,091	946,731,034
Gaji untuk Pelaksanaan Program	858,776,593	986,966,813
Biaya Kantor	598,502,527	506,611,787
Biaya Perjalanan dan Pertemuan	456,132,861	279,937,947
Peningkatan Kapasitas Staff	37,561,638	27,641,000
Sub total Manajemen Kantor	2,788,193,710	2,747,888,581
Aktivitas Program		
1 Program Kemitraan untuk Pembangunan (PPD Ph #2)	651,007,687	3,888,621,254
2 Penguatan Kapasitas di Aceh - ANCORS	10,261,924,496	8,706,584,706
3 Indeks Masyarakat Sipil Tingkat Kabupaten (ACCSES)	-	1,392,082,790
4 Indeks Masyarakat Sipil Tingkat Nasional (ACCSES)	-	25,672,000
5 ACCES Bridging Fund	283,915,722	330,380,545
6 TIFA-Advokasi Pelayanan Publik	94,263,125	-
7 UNDP	391,531,555	-
8 Dukungan Program - YAPPIKA	362,791,358	5,304,279
9 Program - Pelayanan Publik (Breast Cancer)	58,836,050	11,447,955
Sub total Aktivitas Program	12,104,269,993	14,360,093,529
Total Pengeluaran	14,892,463,703	17,107,982,110
Kelebihan Penerimaan atas Pengeluaran (Pengeluaran atas Penerimaan)	(1,294,312,261)	(1,143,655,366)
Jurnal Balik Perolehan dari Dana Hibah ke Aktiva Tetap		-
Saldo dana, Awal	4,106,714,921	5,384,105,636
Koreksi atas Saldo Dana	-	(133,735,350)
Saldo Dana , Akhir	2,812,402,660	4,106,714,921